

ARTIKEL

Mengapa Partai Islam Belum Pernah Menang?: *Path Dependence Repetition* Kekalahan Partai Islam Indonesia Dalam Pemilu Legislatif 1955 Hingga 2019

Agus Riyanto

186-217

Gerakan Syarikat Islam Kembali Ke Khittah Tahun 1905

Gugun Wardiono, Bowo Sugiarto, Ahmad Rofik

218-239

Internationalization Of Islam *Rahmatan Lil 'Alamin* Through Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU): Motivation And Contribution

Andi Purwono

240-257

Dinasti Politik: Basis Politik dan Kepuasan Publik

Wimmy Haliim, Andy Ilman Hakim

258-273

Analisis Biopolitik Dan Kontrol Populasi Penduduk Melalui Program Keluarga Berencana Di Kota Samarinda

M. Najeri Al Syahrin, Mochamad Dziaqie Aulia Al Farauqi, Sri Wahyuni Jamal

274-295

Pemanfaatan Modal Sosial Appi Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Makassar

Hidayat Doe, Muhammad, Sukri, Ariana

296-312

RESENSI BUKU

Oligarki Di Indonesia: Relasi Kapital Yang Dominan

Sunardi

313-317

GERAKAN SYARIKAT ISLAM KEMBALI KE KHITTAH TAHUN 1905

Gugun Wardiono¹, Bowo Sugiarto², Ahmad Rofik³

Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Jenderal Soedirman^{1,2,3}

Email: gugunwardiono@gmail.com¹, bowo.sugiarto@unsoed.ac.id²,
rofikunsoed@ymail.com³

Abstrak

Memanfaatkan teori gerakan sosial, artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyebab organisasi Syarikat Islam kembali ke khittah tahun 1905 serta untuk memahami bagaimanakah gerakan yang dibangun oleh Syarikat Islam untuk mewujudkan agenda kembali ke khittahnya itu. Artikel ini menunjukkan bahwa penyebab Syarikat Islam kembali ke khittah adalah terpecahnya kekuatan politik Islam di Indonesia pasca-Orde Baru menjadi banyak partai politik dan rendahnya tingkat kompetisi partai Islam dalam pemilu. Selain itu, studi ini juga menunjukkan bahwa perpecahan yang disebabkan oleh konflik internal dalam tubuh Syarikat Islam menyebabkan organisasi ini hibernasi dalam waktu yang lama. Gagasan kembali ke khittah dianggap mampu menyatukan mayoritas faksi yang ada. Untuk merealisasikan agenda kembali ke khittah itu, struktur mobilisasi yang dimanfaatkan Syarikat Islam mencakup langkah konsolidasi organisasi sampai memanfaatkan jaringan sosial anggotanya.

Kata Kunci:

Gerakan Sosial, Syarikat Islam, Kembali ke Khittah, Struktur Mobilisasi

Abstract

The article aims to describe the causes of Syarikat Islam which returned to khittah 1905 (original path) and the process of this organisation to return to it. This study conveys the factors which are influenced Syarikat Islam to decide to turn back to its original path: 1. The fragmentation of political Islam and the low level of competitiveness of Islamic party in legislative elections after the New Order era; 2) Internal conflict within Syarikat Islam has caused this organization fragmented and inactive for years. The idea to return to its original path is considered as a solution to reunite previously-fragmented factions within the organization. To realize that agenda, Syarikat Islam has utilized mobilizing structures that includes organizational consolidation and its members' social networks.

Keywords:

Social Movement, Syarikat Islam, Return to Original Path, Mobilizing Structures

Pendahuluan

Sarekat Islam (SI) didirikan di Surakarta pada tanggal 16 Oktober 1905 oleh seorang pengusaha batik asal Laweyan yang bernama Haji Samanhudi¹ dengan nama awal Sarekat Dagang Islam (SDI). SDI merupakan organisasi yang memfokuskan perjuangan di bidang dakwah dan ekonomi.² Organisasi ini pada awal berdirinya merupakan sebuah perkumpulan pedagang-pedagang pribumi muslim dengan tujuan untuk menentang politik Belanda yang memberi keleluasaan kepada pedagang asing untuk menguasai ekonomi pada masa itu agar bisa bersaing dengan pedagang-pedagang besar Tionghoa dan Arab.

Pada 1912 Pemerintah Kolonial Belanda membuat sebuah kebijakan yang memperbolehkan pendirian partai politik. Berdasarkan perkembangan sosial dan politik tersebut H.O.S. Tjokroaminoto³ mengusulkan kepada Haji Samanhudi agar SDI bukan hanya untuk para pedagang saja, tetapi diperluas ke seluruh umat Islam.⁴ Oleh karena itu, H.O.S. Tjokroaminoto kemudian menghadap notaris di Solo untuk membuat badan hukum dengan anggaran dasar SI yang baru menjadi lebih luas, yang sebelumnya hanya mencakup dakwah dan ekonomi kemudian diperluas mencakup sosial dan politik.⁵ Sejak saat itu, SI bermetamorfosa menjadi organisasi politik dengan jumlah anggota yang cukup besar. Setidaknya, SI tercatat sudah mempunyai lebih dari 50 *afdeling* yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.⁶

Sejak semakin aktif di ranah politik dengan tujuan memperjuangkan kemerdekaan nasional, SI kemudian beberapa kali mengalami pergantian nama, yaitu; 1) Central Sarekat Islam (CSI) pada tahun 1916; 2) Partai Sarekat Islam (PSI) pada tahun 1923; 3) Partai Sarekat Islam Hindia Timur (PSIHT) pada tahun 1927; 4) Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) pada tahun 1928 sampai tahun 1973; 5) PSII kemudian

¹ Ketika ia masih kanak-kanak, namanya adalah Sudarno Nadi. Berdasarkan kebiasaan Jawa, namanya diubah menjadi Wirjowikoro ketika ia dewasa dan kemudian sekali lagi berganti menjadi Haji Samanhudi ketika ia telah menunaikan ibadah haji.

² Anton Timur Djaelani, *Gerakan Sarekat Islam: Kontribusinya Pada Nasionalisme Indonesia*, terj. Gordon B. Manuain. (Jakarta: LP3ES, 2017), h. 30-31.

³ Tjokroaminoto lahir di Bakur pada 16 Agustus 1882 bertepatan dengan tahun meletusnya gunung Krakatau di Banten. Ia mempunyai nama kecil Raden Mas Oemar Said Tjokroaminoto. Akan tetapi, setelah ia selesai menunaikan ibadah haji kemudian ia meninggalkan gelar keningratannya dan lebih suka memperkenalkan diri dengan nama Haji Oemar Said Tjokroaminoto atau H.O.S. Tjokroaminoto.

⁴ Amelz, *HOS Tjokroaminoto: Hidup dan Perjuangannya Jilid I* (Jakarta: Bulan Bintang, 1952), h. 50.

⁵ Anton Timur Djaelani, *Op.Cit.*, h. 37-38.

⁶ Tony Andriawan, "Peran Tokoh Ormas Syarekat Islam Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017". *Skrripsi*. (Purwokerto: Jurusan Ilmu Politik Fisip Unsoed, 2018), h. 5.

melakukan fusi partai menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada tahun 1973 sampai tahun 1998.

Pada 5 Januari 1973 partai-partai Islam, seperti Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi), Nahdlatul Ulama (NU), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) melakukan fusi partai politik menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).⁷ Kebijakan rezim Orde Baru (Orba) membuat fusi partai politik tersebut berakibat pada merosotnya perkembangan partai Islam di Indonesia. Masa ini merupakan salah satu masa paling krusial dalam sejarah politik kepartaian dalam dinamika politik di Indonesia.

Pada tahun 1998 PSII terpecah menjadi dua, yaitu PSII di bawah pimpinan Taufik R. Tjokroaminoto dan PSII 1905 di bawah pimpinan Ohan Sudjana. Kemudian pada tahun 1999, keduanya turut serta mengikuti Pemilu, sehingga pada saat Pemilu tahun itu muncul dua PSII. Namun, hal tersebut tidak berjalan dengan mulus, karena PSII 1905 tidak lolos *Stembus Accoord*. Sejak tahun 1999, PSII 1905 pimpinan Ohan Sudjana kemudian berganti nama menjadi Syarikat Islam Indonesia (SII) hingga sekarang.

Setelah mengalami perpecahan dan rekonsiliasi, PP SI yang dulu dipimpin oleh Taufik R. Tjokroaminoto memutuskan SI untuk kembali ke khittah pada penyelenggaraan Majelis Tahkim (MT) ke-40 SI di Bandung pada tahun 2015. Kembali ke khittah maksudnya adalah SI kembali menjadi organisasi yang bergerak di bidang dakwah dan ekonomi. Dengan kata lain, ada keinginan untuk menjadikan SI sebagai organisasi yang menghidupkan dagang dan wirausaha di kalangan umat Islam. Penyelenggaraan MT itu juga memilih Hamdan Zoelva sebagai ketua umum.

Setelah mengalami kemunduran, yang salah satunya merupakan akibat dari konflik internal, SI kini cenderung dilupakan, bahkan masyarakat banyak yang tidak tahu mengenai organisasi yang dibesarkan oleh H.O.S. Tjokroaminoto ini. Studi tentang kembalinya organisasi ini ke jati diri awalnya pun cenderung masih sedikit atau belum dikaji dengan serius. Dengan latar belakang tersebut, artikel ini berupaya mengkaji apa yang menyebabkan organisasi SI kembali ke khittahnya, serta bagaimanakah gerakan yang dibangun oleh SI untuk kembali ke khittahnya itu.

⁷ Hanifah, "Perjuangan Sarekat Islam Dalam Melawan Kolonialisme Belanda di Sumenep Madura 1913-1920". *Skripsi*. (Yogyakarta: Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2003), h. 75.

Artikel ini dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian pendahuluan membahas latar belakang dari fokus artikel ini, yaitu kembalinya SI ke khittah awalnya. Bagian kedua menjelaskan secara singkat kerangka konseptual yang digunakan dalam studi ini. Bagian ketiga berisi informasi seputar metode penelitian dari studi ini. Setelah itu adalah bagian pembahasan yang akan menjawab pertanyaan seputar penyebab kembalinya SI ke khittahnya dan apa yang dilakukan oleh organisasi ini untuk mewujudkan agendanya itu. Terakhir adalah bagian penutup yang menyimpulkan jawaban atas pertanyaan yang dikaji artikel ini.

Penelitian Terdahulu

Sejumlah studi kontemporer tentang Syarikat Islam masih cenderung mengkaji tentang kiprah organisasi ini dalam konteks historis. Misalnya artikel Endang Muryanti yang mengkaji kemunculan Sarekat Islam Semarang pada tahun 1913 dan perpecahannya yang berhubungan dengan diadopsinya ideologi Sosialisme-Revolusioner oleh sebagian pengikut organisasi ini.⁸ Konflik internal Sarekat Islam yang berhubungan dengan persoalan ideologi Sosialisme juga dikaji oleh Retno Winarni dan Mrr. Ratna Endang Widuati.⁹ Sementara studi Ismail Usman mengkaji soal sumbangan organisasi ini terhadap pembaharuan politik Islam dan gagasan nasionalisme dalam konteks Indonesia.¹⁰

Sedangkan studi Arif Rahim mengkaji soal karakter Sarekat Islam sebagai organisasi Islam modernis.¹¹ Studi yang lebih komprehensif tentang sumbangan Sarekat Islam terhadap gagasan nasionalisme Indonesia dilakukan oleh Anton Timur Djaelani.¹² Disamping studi yang mengkaji Sarekat Islam secara historis, ada juga studi yang mengkaji kiprah politik Partai Syarikat Islam Indonesia pada masa Orde Baru.¹³ Meskipun studi yang dilakukan oleh Valina Singka Subekti ini penting bagi para

⁸ Endang Muryanti, "Muncul dan Pecahnya Sarekat Islam di Semarang 1913-1920" dalam *Paramita: Historical Studies Journal*, Vol. 20, No. 1 (2010), h. 21.

⁹ Retno Winarni dan Mrr. Ratna Endang Widuati, "Konflik Politik Dalam Pergerakan Sarekat Islam 1926" dalam *Literasi: Indonesian Journal of Humanities*, Vol. 5, No. 2 (2015), h. 216.

¹⁰ Ismail Usman, "Sarekat Islam (SI) Gerakan Pembaruan Politik Islam" dalam *Jurnal Potret: Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam*, Vol. 1, No. 21 (2017), h. 46.

¹¹ Arif Rahim, "Sarekat Islam: Gerakan Islam Modernis atau Tradisional?" dalam *Jurnal Ilmiah Dikdaya*, Vol. 10, No. 1 (2020), h. 119.

¹² Anton Timur Djaelani, *Loc.Cit.*

¹³ Valina Singka Subekti, *Partai Syarikat Islam Indonesia: Konstestasi Politik hingga Konflik Kekuasaan Elite* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014).

peminat kajian politik Islam di Indonesia, tapi dia juga sama dengan studi yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu tidak mengkaji perkembangan kontemporer Syarikat Islam, lebih khusus lagi seputar keputusan Syarikat Islam untuk kembali ke khittah tahun 1905. Riset tentang Syarikat Islam memang relatif sudah banyak, tapi kajian tentang alasan yang mendorong organisasi ini untuk kembali ke khittah mereka masih langka. Karena itu, studi ini akan memberi kontribusi terhadap kajian tentang Syarikat Islam kontemporer yang memutuskan untuk kembali menjadi gerakan sosial berbasis Islam.

Kerangka Konseptual

Studi ini melihat Syarikat Islam (SI) dalam perspektif gerakan sosial. Studi ini mengikuti jejak para ahli yang sudah terlebih dahulu memanfaatkan konsep gerakan sosial untuk menganalisis gerakan Islam. Misalnya Ziad Munson yang menjelaskan mobilisasi gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir dengan meminjam konsep struktur kesempatan politik yang ada dalam teori gerakan sosial.¹⁴ Quintan Wiktorowicz mengeksplorasi lebih jauh sejumlah konsep dasar dalam teori gerakan sosial seperti ketersediaan sumber daya, struktur mobilisasi, struktur kesempatan, dan proses pembingkaihan (*framing*) untuk menganalisis gerakan Islam.¹⁵ Sementara mengapresiasi penggunaan teori gerakan sosial untuk melihat gerakan Islam, Asef Bayat juga menekankan kemungkinan mengajukan tambahan konsep baru, yaitu solidaritas yang terbayangkan (*imagined solidarities*) ke teori tersebut agar lebih sesuai dengan konteks masyarakat Muslim.¹⁶ Perspektif gerakan sosial juga digunakan oleh Syarifuddin Jurdi untuk menganalisis gerakan Islam di Indonesia.¹⁷

Studi ini sendiri meminjam konsep mobilisasi sumber daya dan proses pembingkaihan untuk melihat upaya SI mengonsolidasi dirinya setelah lama vakum dan terpecah-pecah dalam beberapa faksi. Dalam proses pembingkaihan, pemimpin gerakan sosial mengidentifikasi masalah yang ada kemudian memberikan arahan tentang

¹⁴ Ziad Munson, "Islamic Mobilization: Social Movement Theory and the Egyptian Muslim Brotherhood" dalam *The Sociological Quarterly*, Vol. 42, No. 4 (2001), h. 487.

¹⁵ Quintan Wiktorowicz, "Islamic Activism and Social Movement Theory: a New Direction for Research" dalam *Mediterranean Politics*, Vol. 7, No. 3 (2002), h. 187.

¹⁶ Asef Bayat, "Islamism and social movement theor" dalam *Third World Quarterly*, Vol. 26, No. 6 (2005), h. 891.

¹⁷ Syarifuddin Jurdi, "Gerakan Sosial Islam: Kemunculan, Eskalasi, Pembentukan Blok Politik dan Tipologi Artikulasi Gerakan" dalam *JPP (Jurnal Politik Profetik)*, Vol. 1, No. 1 (2013).

tindakan kolektif yang harus dilakukan. Kerangka aksi kolektif (*collective action frames*) memandu anggota sebuah gerakan terkait apa, bagaimana, dan kenapa sesuatu itu harus dilakukan.¹⁸ Gagasan untuk kembali ke khittah yang diusung SI sekarang dilihat dari perspektif demikian. Sementara struktur mobilisasi dipahami sebagai “*collective vehicles, informal as well as formal, through which people mobilize and engage in collective action.*”¹⁹ Dengan demikian, studi ini memanfaatkan konsep struktur mobilisasi untuk menjelaskan gerakan yang dibangun oleh Syarikat Islam untuk kembali ke khittahnya tersebut.

Metode Penelitian

Artikel ini disusun berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan pada bulan April sampai bulan Mei 2019 dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dan informasi yang dibutuhkan didapatkan melalui wawancara dengan para narasumber kunci yang relevan, yaitu para pengurus SI baik pusat maupun daerah. Pengurus yang berasal dari daerah mencakup yang berasal dari Jakarta, Bekasi dan Banjarnegara. Selain data yang dikumpulkan melalui wawancara, penulis juga memanfaatkan dokumen-dokumen seperti hasil Rapat Kerja Nasional, hasil Musyawarah Kerja Nasional Syarikat Islam serta buku-buku dan jurnal yang relevan.

Sejarah Syarikat Islam

Sarekat Islam (SI) didirikan oleh Haji Samanhudi bersama Suwadi dan Raden Gunawan di Surakarta pada 16 Oktober 1905 dengan nama awal Sarekat Dagang Islam (SDI). SDI merupakan sebuah organisasi yang fokus utamanya adalah pada aktivitas dakwah dan ekonomi. Dalam perkembangannya, SI kemudian bertransformasi menjadi sebuah organisasi besar. Haji Samanhudi dan H.O.S. Tjokroaminoto mempunyai peran yang sangat besar terhadap perkembangan organisasi. Dalam perjalanannya, SI beberapa kali mengalami konflik internal yang menyebabkan organisasi terpecah sehingga peran sosial-politik organisasi semakin menurun. Selama periode pendudukan Jepang pada tahun 1942, tidak ada partai politik yang diizinkan untuk berfungsi

¹⁸ Hank Johnston, *What is a social movement?* (Cambridge: Polity Press, 2014), h. 17.

¹⁹ Doug McAdam, Sidney Tarrow, Sidney, and Charles Tilly, *The Dynamics of contention* (New York: Cambridge University Press, 2001), dikutip dalam Hank Johnston, *What is a social movement?* (Cambridge: Polity Press, 2014), h. 66.

sehingga PSII memutuskan untuk menutup kantornya atau dengan kata lain bubar sementara sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. PSII kemudian baru mengaktifkan kembali gerakannya mulai tahun 1946. Meskipun sempat vakum selama beberapa tahun, namun PSII masih mampu menunjukkan eksistensinya dengan memperoleh 8 kursi Dewan Perwakilan Rakyat dan 16 kursi Konstituante. Dengan kondisi keamanan negara yang belum stabil, terjadi banyak kekacauan di berbagai wilayah di Indonesia. Akibat dari kondisi tersebut PSII tidak mempunyai banyak waktu untuk mengembangkan diri sampai berakhirnya rezim Orde Lama setelah peristiwa G30S.

Selama masa Orde Baru, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) mengalami masa-masa sulit. Terhentinya aktivitas partai dan organisasi serumpun berkontribusi terhadap periode sulit tersebut. Akibatnya PSII tidak bisa melakukan kaderisasi sehingga partai merekrut orang-orang muda tanpa mengikuti jenjang kaderisasi. Selain itu, perolehan suara yang sangat kecil, yaitu 2.39% pada pemilihan umum tahun 1971, pengambilalihan kekuasaan partai pasca Majelis Taklim ke-33 pada tahun 1972 serta fusi partai politik dengan sesama partai-partai Islam pada tahun 1973 membuat PSII semakin terpecah-pecah. Dengan demikian, pasca tahun 1973 semua aktivitas dan peran sosial politik partai berhenti sampai berakhirnya rezim Orde Baru.

Naiknya Habibie sebagai presiden menandai awal dari sebuah era baru yang dikenal dengan Orde Reformasi. Pada 23 Mei 1998, tokoh-tokoh partai memunculkan kembali PSII. Namun, tidak adanya kesepakatan di antara para tokoh membuat partai terpecah menjadi dua, yaitu PSII 1905 pimpinan Ohan Sudjana dan PSII pimpinan Taufik R. Tjokroaminoto. Sehingga kedua partai tersebut terdaftar sebagai peserta Pemilu 1999. Namun, perpecahan tersebut berakibat pada rendahnya perolehan suara yang didapat oleh kedua partai tersebut. Pasca Pemilu 1999, PSII 1905 menyelenggarakan MT ke-35 pada tahun 2003 di Garut dengan keputusan PSII 1905 kembali berstatus menjadi ormas dengan nama Syarikat Islam Indonesia (SII). Sedangkan PSII pimpinan Taufik R. Tjokroaminoto terpecah menjadi beberapa faksi dan perpecahan tersebut berlanjut sampai tahun 2015.

Penyelenggaraan MT ke-40 pada tahun 2015 kemudian dimanfaatkan untuk menyatukan kembali faksi-faksi SI yang terpecah. Setelah melalui perdebatan yang

cukup panjang, semua pimpinan faksi akhirnya memutuskan bahwa setiap faksi akan mengadakan kongres sendiri-sendiri. Namun, dalam kongres masing-masing faksi harus menghasilkan keputusan yang sama, yaitu memilih Hamdan Zoelva sebagai Ketua Umum Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam untuk masa jihad 2015-2020. Setelah terpilih sebagai ketua umum, Hamdan Zoelva langsung menyusun kepengurusan yang berisikan orang-orang dari tiga kepengurusan faksi Syarikat Islam. Selain itu, MT SI juga memutuskan bahwa SI harus kembali ke khittah, yaitu sebagai organisasi yang bergerak di bidang dakwah dan ekonomi sebagai upaya untuk mengembalikan SI pada kejayaannya.

Kembali Ke Khittah Tahun 1905

Sebagai organisasi Islam, sejak awal berdirinya sampai saat ini Syarikat Islam (SI) masih memegang teguh cita-cita perjuangan organisasi, yaitu mewujudkan kehidupan manusia yang seutuhnya sebagai hamba Allah yang berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah Rasul dengan terciptanya kemerdekaan sejati bagi segenap umat manusia yang diridhai Allah SWT. Keputusan untuk menyelenggarakan Majelis Tahkim (MT) ke-40 tidak lain merupakan upaya untuk merekonstruksi dan merevitalisasi gerak langkah perjuangan SI agar tetap sejalan dengan cita-cita perjuangannya.

MT ke-40 SI yang diselenggarakan di Bandung pada 24-27 November 2015 memutuskan agar SI melakukan gerakan kembali ke khittah, yaitu mengembalikan organisasi kepada cita-cita awal perjuangannya sebagai organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang dakwah dan ekonomi. Kesenjangan ekonomi antara orang kaya dengan orang miskin tampaknya semakin tinggi. Keputusan kembali ke khittah menjadi sebuah keniscayaan yang memang harus ditempuh oleh SI, dengan menempatkan gerakan ekonomi keumatan menjadi tujuan utama yang harus diejawantahkan secara konkret dan berkesinambungan.

Keputusan SI kembali ke khittah dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal, yaitu merespon kondisi partai-partai Islam maupun gerakan-gerakan Islam yang ada saat ini. Sedangkan, faktor internal, yaitu masih terpecah-pecahnya SI ke dalam beberapa faksi akibat konflik elite pimpinan

partai. Sehingga keputusan untuk tidak lagi menjadi partai politik dengan kembali ke khittah merupakan solusi untuk menyatukan kembali faksi-faksi SI yang terpecah.

Faktor Eksternal Organisasi

Faktor eksternal yang mendorong Syarikat Islam (SI) untuk kembali ke khittahnya adalah kondisi faktual partai-partai Islam di Indonesia. Sebagian partai Islam cenderung memilih jalan pintas untuk dapat kompetitif dalam Pemilu, seperti merekrut tokoh nasional, pengusaha maupun orang berpengaruh tanpa melalui sistem kaderisasi partai dalam upaya menaikkan perolehan suara dalam Pemilu. Ini menyebabkan masyarakat kesulitan untuk membedakan partai-partai Islam dengan partai-partai lainnya. Berbagai gerakan atau partai Islam yang ada saat ini juga tampak tidak konsisten. Mereka banyak yang terjebak untuk melakukan tawar-menawar atau kompromi dengan penguasa, bekerjasama atau berkoalisi dengan partai-partai lain. Selain itu, partai-partai Islam juga tidak mampu mendeskripsikan dengan jelas metode perjuangan yang harus mereka lakukan.²⁰ Sehingga apa yang mereka lakukan hanya bersifat reaksioner saja.

Terpecahnya kekuatan politik Islam dengan terbentuknya banyak partai Islam juga membuat masyarakat semakin bingung untuk menentukan pilihannya. Karena, siapa sesungguhnya yang menjadi representasi dari Islam itu sendiri. Oleh karena itu, partai Islam tidak hanya bersaing dengan partai-partai nasionalis akan tetapi mereka bersaing juga dengan sesama partai Islam. Hasil dua Pemilu legislatif terakhir menunjukkan relatif stagnannya perolehan suara partai-partai berbasis massa tradisional Muslim, yaitu. 31,41% pada 2014 dan 30,05% pada 2019.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka SI memutuskan untuk kembali mengisi peran sebagai organisasi yang menggerakkan ekonomi umat Islam. Apalagi SI mempunyai unsur kesejarahan yang kuat dalam bidang ekonomi, yaitu saat masih bernama Sarekat Dagang Islam (SDI). Selain itu, keputusan untuk kembali ke khittah dengan menjadi organisasi yang bergerak di bidang dakwah dan ekonomi juga dimaksudkan sebagai upaya untuk mengembalikan SI kepada kejayaannya. Karena,

²⁰ Muhammad Hawari, *Politik Partai: Meretas "Jalan Baru" Perjuangan Partai Politik Islam* (Bogor: CV IDEa Pustaka Utama, 2003), h. 17.

mewujudkan kemandirian ekonomi bagi umat Islam merupakan tujuan didirikannya organisasi SI.

Faktor Internal Organisasi

Konflik internal berujung kudeta kepemimpinan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) pada tahun 1972 menjadi titik awal penurunan peran sosial politik partai, karena peristiwa tersebut kemudian menjadi sangat berkepanjangan. Setelah peristiwa pengambilalihan kepemimpinan PSII serta fusi partai politik menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada tahun 1973, SI tidak lagi melakukan konsolidasi dan kaderisasi. Oleh karena itu, peran sosial politik SI menjadi semakin menurun hingga akhirnya mengalami kevakuman hampir di seluruh wilayah Indonesia. Kondisi tersebut bertahan hingga berakhirnya rezim Orde Baru.

Pasca Pemilu 1999, untuk menyelamatkan organisasi PSII 1905 menyelenggarakan MT ke-35 pada tahun 2003 di Garut, Jawa Barat. Dalam sidangnya, peserta MT memutuskan untuk melanjutkan eksistensi pengabdian dan perjuangan PSII 1905 dengan kembali berstatus menjadi ormas dengan nama Syarikat Islam Indonesia hingga sekarang. Sedangkan, PSII pimpinan Taufik R. Tjokroaminoto menyelenggarakan MT di Bekasi. Akan tetapi, dalam MT tersebut terjadi perpecahan yang mengakibatkan organisasi terpecah menjadi dua faksi, yaitu DPP PSII dengan ketua umum terpilih Taufik R. Tjokroaminoto dan PP SI dengan ketua umum terpilih Amrullah Ahmad. Lalu pada tahun 2003, kembali terjadi perpecahan dalam tubuh PSII yang menyebabkan adanya dua penyelenggaraan MT. MT PSII yang dilaksanakan di Lembang memilih Amrullah Ahmad sebagai ketua umum, sedangkan MT PSII di Pondok Gede dengan ketua umum terpilih Rahardjo Tjakraningrat.

PP SI pimpinan Amrullah Ahmad dalam perjalanannya kemudian mengalami perpecahan juga dengan terselenggaranya 2 MT, yaitu MT di Bandung memilih Djauhari Syamsuddin sebagai ketua umum dan MT di Jakarta dengan ketua umum terpilih Rahardjo Tjakraningrat. Pada tahun 2004 PSII pimpinan Amrullah Ahmad melakukan islah dengan SI pimpinan Djauhari Syamsuddin dengan menyelenggarakan MT bersama. Dalam MT ke-38 tersebut terpilihlah Amrullah Ahmad sebagai Ketua Umum dan Djauhari Syamsuddin sebagai Sekretaris Jenderal SI untuk masa jihad 2004-2009. Kemudian, MT SI ke-39 diselenggarakan pada tanggal 23-25 April 2010 di

Kabupaten Bandung. Para pemegang mandat memutuskan untuk memilih Amrullah Ahmad sebagai Ketua Dewan SI dan Djauhari Syamsuddin terpilih sebagai Ketua Umum Lajnah Tanfidziyah SI untuk masa jihad 2010-2015.

Dalam perjalanan organisasi sejak tahun 2004 memang tidak banyak kegiatan yang dilaksanakan. Bahkan, kaderisasi dan konsolidasi ke daerah-daerah tidak dilakukan. Sehingga wilayah-wilayah dan cabang-cabang yang sebelumnya sudah vakum sampai tahun 2010 belum juga bisa dihidupkan kembali. Oleh karena itu, aktivitas organisasi hanya berputar pada kegiatan dari MT ke MT saja. Sampai sebelum tahun 2015 kepengurusan SI masih terbagi menjadi empat faksi, yaitu SI pimpinan Djauhari Syamsuddin, SI pimpinan Rahardjo Tjakraningrat, Kaum Syarikat Islam pimpinan Maulana Nurhalim Chotib Al-Bantany di Sukabumi dan Syarikat Islam Indonesia. Namun, akibat dari tidak berjalannya kegiatan-kegiatan organisasi di tingkat pusat hingga daerah menyebabkan setiap faksi SI tidak memiliki data detail mengenai wilayah-wilayah dan cabang-cabang mana saja yang masih aktif serta wilayah dan cabang yang berada di bawah kepengurusan faksi tersebut tidak bisa dipastikan berapa jumlahnya.²¹

Dengan demikian, mengembalikan SI ke khittah perjuangannya menjadi satu-satunya solusi untuk menyatukan kembali faksi-faksi SI yang terpecah. Seperti yang diindikasikan sebelumnya, perpecahan yang terjadi dalam tubuh SI terjadi akibat dari transformasi SI menjadi partai politik. Oleh karena itu, dengan tidak lagi aktif dalam politik praktis maka SI akan sepenuhnya fokus pada konsolidasi organisasi dalam upaya menghidupkan kembali wilayah-wilayah dan cabang-cabang yang sebelumnya vakum. Sehingga upaya membangkitkan kembali SI kepada kejayaannya sesuai dengan cita-cita perjuangan para pendiri organisasi dapat terwujud.

Struktur Mobilisasi

Majelis Tahkim ke-40 SI di Bandung telah menghasilkan keputusan bahwa SI harus kembali ke khittah, yaitu kembali menjadi organisasi yang bergerak di bidang dakwah dan ekonomi. Keputusan tersebut diambil dalam upaya untuk mempersatukan

²¹ Sampai penulisan artikel ini selesai, data detail mengenai wilayah dan cabang mana saja yang mendukung dan berada di bawah kepengurusan dari setiap faksi tidak dapat penulis temukan dan dapatkan baik itu melalui dokumen tertulis maupun hasil wawancara dengan beberapa responden utama.

faksi-faksi SI yang sebelumnya terpecah-pecah. Kebangkitan kembali SI kemudian menjadi tujuan bersama yang ingin diwujudkan oleh semua kader di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut maka DPP SI dalam rapat pleno yang diselenggarakan pada tanggal 27-28 Februari 2016 di Jakarta telah menetapkan empat hal yang harus dilakukan oleh SI, yaitu: 1) Konsolidasi Organisasi; 2) Pemberdayaan Ekonomi; 3) Tata Kelola Pendidikan; 4) dan *Siyasah*. Empat hal tersebut kemudian disebut Catur Program Syarikat Islam. Catur program ini sebagai landasan dan arahan gerak perjuangan SI sejak tahun 2015. Catur program tersebut kemudian dibahas secara detail serta disosialisasikan ke utusan wilayah-wilayah dan cabang-cabang seluruh Indonesia dalam Musyawarah Kerja Nasional 1 (Mukernas 1) SI pada tanggal 19-21 Mei 2017 di Gedung Diklat Mahkamah Konstitusi, Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

Catur Program Syarikat Islam

Catur program merupakan program prioritas yang akan dilakukan oleh SI. Program prioritas yang dimasukkan ke dalam catur program merupakan respon atas permasalahan yang saat ini memang sedang dirasakan langsung oleh masyarakat khususnya umat Islam, yaitu permasalahan pendidikan, ekonomi dan politik. Ketimpangan ekonomi, akses terhadap pendidikan dan partisipasi dalam politik masih menjadi permasalahan utama dalam masyarakat. Oleh sebab itu, catur program ini selain sebagai upaya untuk membangkitkan SI tetapi juga sebagai bentuk keterlibatan SI untuk berkontribusi dalam mengatasi permasalahan masyarakat. Dengan demikian, dalam rangka untuk membenahi permasalahan kemiskinan maka SI menjadikan catur program sebagai *focal concern* (titik fokus) pekerjaan yang harus diejawantahkan dalam program aksi kepemimpinan DPP SI masa jihad 2015-2020.

1. Konsolidasi Organisasi

Konsolidasi organisasi Syarikat Islam (SI) merupakan konsolidasi menyeluruh yang mencakup ideologi, kesamaan visi dan pemahaman serta program aksi. Konsolidasi dan penataan bangunan organisasi SI menjadi pekerjaan yang paling mendasar dan utama. Oleh karena itu, konsolidasi organisasi merupakan hal yang sangat penting dan menjadi prioritas utama dalam kepemimpinan DPP SI pimpinan Hamdan

Zoelva selain program ekonomi dan pendidikan.²² Program-program yang sudah disusun khususnya di bidang ekonomi dan pendidikan tidak akan bisa berjalan maksimal jika wilayah dan cabang belum terbentuk. Hal itu karena wilayah dan cabang merupakan kepanjangan tangan DPP SI dalam menjalankan kegiatan-kegiatannya di masyarakat.

Program-program di bidang organisasi ini kemudian disusun dalam program aksi dan ditetapkan dalam Rapat Pleno DPP SI di Jakarta. Program-program tersebut di antaranya: *Pertama*, penataan dan pemantapan struktur organisasi SI. Hal ini diarahkan untuk penguatan dan tertib organisasi secara menyeluruh, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penertiban administrasi keanggotaan dan keuangan, sarana-prasarana penunjang organisasi dan aspek kepemimpinan. *Kedua*, penertiban dan pembinaan organisasi dilakukan secara terencana dan bertahap. *Ketiga*, pemahaman, penghayatan dan pengamalan Program Asas dan Program Tandhim serta Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT) Syarikat Islam.²³

Keempat, pembinaan kualitas sumber daya manusia (SDM) anggota SI. Dalam upaya peningkatan kualitas SDM SI maka anggota-anggota diarahkan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh SI secara bertahap dan berjenjang baik formal maupun informal. *Kelima*, ikhtiar komunikasi timbal balik dalam membangun kebersamaan karena komunikasi merupakan salah satu faktor penting guna peningkatan ketercapaian program di daerah. *Keenam*, keanggotaan dan tata laksana organisasi. Selama masa perpecahan khususnya dalam 10 tahun terakhir, SI tidak lagi melakukan kaderisasi. Oleh karena itu, registrasi keanggotaan menjadi salah satu program prioritas yang akan dilaksanakan oleh DPP SI. Setiap anggota akan didata untuk diterbitkan kartu anggota sebagai identitas bahwa yang bersangkutan merupakan anggota SI. Hal tersebut juga akan memudahkan pengurus dalam melakukan pendataan anggota.

Ketujuh, penataan kantor sekretariat organisasi. Kantor atau sekretariat merupakan pusat kegiatan sebuah organisasi. Selain itu, kantor juga merupakan cerminan akan keberadaan organisasi. Dengan demikian, dari pusat hingga wilayah-wilayah dan cabang-cabang bagi SI menjadi sebuah kewajiban untuk memiliki kantor

²² Syafruddin Djosan, Wakil Sekretaris Jenderal Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam, *wawancara*, 30 April 2019.

²³ Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Syarikat Islam, Jakarta, tanggal 27-28 Februari 2016, h. 7-8.

dengan berbagai sarana dan prasana pelengkap di dalamnya. Oleh karena itu, DPP SI saat ini sedang merencanakan untuk membangun kantor DPP guna mendukung semua kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh SI maupun organisasi serumpun. *Kedelapan*, penataan organisasi serumpun Kaum Syarikat Islam. Organisasi serumpun didirikan untuk membantu SI menjalankan program-program aksinya serta sebagai wadah untuk melakukan kaderisasi dan mencetak anggota-anggota berkualitas guna mengisi kepemimpinan di masa yang akan datang. Organisasi serumpun juga menjadi bagian penting bagi perkembangan SI.²⁴

Sejak kepengurusan Hamdan Zoelva resmi dilantik pada tahun 2016, SI terus melakukan konsolidasi organisasi ke tiap-tiap daerah untuk membangun kembali wilayah-wilayah dan cabang-cabang yang sebelumnya vakum. Selain itu, wilayah-wilayah dan cabang-cabang yang sebelumnya masih aktif akan didata kembali dan diberikan surat keputusan (SK) yang baru di bawah kepengurusan Hamdan Zoelva. Hal ini dilakukan karena kepengurusan SI di tiap daerah sebelumnya berada di bawah faksi SI yang berbeda-beda. Meskipun berjalan cukup lambat, akan tetapi hasil konsolidasi organisasi sampai awal tahun 2019 ini cukup memuaskan, yaitu dengan terbentuknya kepengurusan SI di 25 wilayah (provinsi) dan 114 cabang (kabupaten/kota).

2. Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan di bidang ekonomi dimaksudkan sebagai upaya untuk mengembalikan Syarikat Islam pada fitrahnya sebagaimana awal organisasi ini didirikan, yakni perhimpunan pedagang yang digerakkan oleh para saudagar-saudagar muslim. Upaya untuk mewujudkan kemandirian ekonomi umat Islam kemudian disusunlah Program Aksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) SI masa jihad 2015-2020. Program-program tersebut disepakati dalam sebuah Rapat Pleno di Jakarta pada tanggal 27-28 Februari 2016. Untuk memastikan kelancaran program-program SI maka Hamdan Zoelva selaku Ketua Umum LT SI kemudian menunjuk Andrinof Chaniago dan Sandiaga Uno sebagai Ketua dan Wakil Ketua Majelis Ekonomi LT Syarikat Islam.

Penunjukan Andrinof Chaniago sebagai Ketua Majelis Ekonomi SI diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan pemberdayaan ekonomi SI. Pengalaman menjabat

²⁴ Musyawarah Kerja Nasional I Syarikat Islam, Gedung Diklat Mahkamah Konstitusi, Cisarua, tanggal 19-21 Mei 2017, h. 10.

sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional di era awal kepemimpinan Presiden Jokowi membuat dia mempunyai kedekatan dengan pemerintah. Oleh karena itu, Andrinof Chaniago bisa menjadi kepanjangan tangan SI untuk menjalin kemitraan dengan pemerintah dalam upaya melancarkan pengembangan usaha milik SI. Sebagai seorang pengusaha, Sandiaga Uno juga diharapkan dapat membantu SI menjalin relasi dan kemitraan dengan para pengusaha di Indonesia khususnya untuk membantu menggerakkan program-program ekonomi SI. Namun, kemitraan yang akan terjalin tersebut bukan hanya bertujuan untuk membantu SI saja. Akan tetapi, kemitraan ini dibangun dengan prinsip hubungan timbal balik dalam nuansa *altruism* (semangat untuk membantu dan mementingkan kepentingan orang lain).

Program-program ekonomi yang telah disusun oleh DPP SI tersebut di antaranya; *Pertama*, pengembangan ekonomi kaum lemah. *Kedua*, membangun dan mengembangkan sistem jaringan dan sumber-sumber ekonomi dengan mendorong anggota SI untuk aktif membangun koperasi untuk lingkup internal maupun eksternal.²⁵ Perdagangan yang dilakukan oleh koperasi yang ada di setiap cabang SI dilakukan dalam bentuk dua jenis perdagangan. *Pertama*, *perdagangan kecil*. Untuk perdagangan kecil itu berkaitan dengan jaringan ekonomi yang ada di masyarakat. Contohnya koperasi yang dikelola pengurus SI Kota Bekasi melakukan pembinaan kepada warung-warung kecil. Tercatat jumlah anggota koperasi yang berada di bawah binaan SI ada 500 warung. Pembinaan yang dilakukan ini bertujuan untuk membantu meningkatkan usaha kecil menjadi usaha yang lebih besar. *Kedua*, *perdagangan besar*. Perdagangan besar ini berkaitan dengan ekspor yang pengelolaannya dilakukan oleh koperasi pusat yang dikelola oleh DPP SI. Contohnya usaha perdagangan DPC SI Kota Manado fokus pada ekspor ikan tuna dan beberapa komoditas lainnya ke Asia Tenggara, Jepang dan beberapa negara di Eropa. Selain itu, DPC SI Manado juga akan segera mendirikan pasar dan toko daging halal. Masyarakat yang beragama Islam di sana cukup kesulitan untuk mencari daging halal.²⁶

²⁵ Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Syarikat Islam, Jakarta, tanggal 27-28 Februari 2016, h. 8-9.

²⁶ Nunung Suhudiah, Ketua Tim Percepatan dan Pengembangan Ekonomi Syarikat Islam serta Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Syarikat Islam Kota Bekasi, *wawancara*, 6 Mei 2019. Program pemberdayaan ekonomi ini berjalan beriringan dengan program konsolidasi organisasi. Sehingga, bagi daerah yang belum terbentuk kepengurusan SI-nya maka program pemberdayaan ekonomi di daerah tersebut tidak akan berjalan. Oleh karena itu, program pemberdayaan ekonomi hanya akan dilaksanakan di daerah yang sudah terbentuk kepengurusan SI-nya. Namun, ternyata program tersebut tidak dapat berjalan semua karena

Ketiga, pemberdayaan kelembagaan ekonomi dengan mengaktifkan kembali lembaga ekonomi dan keuangan SI. Pendirian lembaga ekonomi tersebut harus disesuaikan dengan potensi wilayah masing-masing agar pengembangan ekonomi di daerah tersebut bisa maksimal dan perekonomian masyarakat sekitar dapat meningkat. *Keempat*, kemitraan dengan pemerintahan dan swasta dalam ekonomi syariah dan ketenagakerjaan. Kerja sama penting untuk dilakukan agar pengelolaan usaha SI bisa lebih profesional. Selain itu, SI juga tidak bisa sendirian dalam melakukan usaha-usahanya dalam pengembangan ekonomi umat. *Kelima*, penghimpunan dana kemaslahatan kaum.

Pengembangan Ekonomi Syarikat Islam dilakukan oleh koperasi melalui kantor dagang yang berdiri berjenjang dari pusat hingga anak cabang/ranting. Usaha-usaha yang dilakukan harus disesuaikan dengan potensi di daerah tersebut. Agar masyarakat di daerah tersebut dapat terdorong untuk maju melalui koperasi SI. Karena SI mempunyai tujuan untuk membangun ekonomi kerakyatan di lingkungan kaum SI dan kaum muslimin pada umumnya.

Akan tetapi, upaya pembentukan koperasi di wilayah dan cabang di seluruh Indonesia saat ini masih menemui kendala. Kepengurusan SI yang sudah terbentuk belum terbiasa untuk mengaplikasikan program gerakan ekonomi melalui koperasi sebab selama ini SI sangat identik dengan partai politik.²⁷ Oleh karena itu, mereka belum mempunyai pengalaman secara empirik mengenai gerakan ekonomi SI. Dengan demikian, sebelum daerah-daerah mendirikan koperasi terlebih dahulu pengurus SI pusat memberikan pemahaman dan mengenalkan mereka dengan gerakan ekonomi SI.

Konsolidasi organisasi yang dilakukan SI pusat tidak cukup hanya dengan membentuk kepengurusan di wilayah dan cabang saja. Akan tetapi tetap ada pendampingan karena untuk bisa menjalankan pemberdayaan ekonomi yang sesuai dengan rancangan DPP SI butuh pemahaman dan pengalaman. Bagi wilayah dan cabang SI yang sudah mati sangat lama, hal ini akan menjadi sesuatu yang benar-benar baru bagi mereka. Oleh karena itu, program pendampingan menjadi sangat penting untuk

berbagai hal. Selain itu, meskipun program pemberdayaan ekonominya dapat berjalan, tetapi daerah tersebut belum bisa memberikan laporannya secara detail kepada pengurus SI di pusat. Sehingga, penulis belum bisa memberikan penjelasan secara detail mengenai progres dari setiap daerah yang program pemberdayaan ekonominya sudah berjalan.

²⁷ Syafruddin Djosan, Wakil Sekretaris Jenderal Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam, *wawancara*, 30 April 2019.

membantu wilayah dan cabang SI yang belum bisa menjalankan kegiatannya secara mandiri.²⁸

Untuk mempercepat realisasi program aksi di bidang ekonomi SI maka DPP SI membentuk Tim Percepatan dan Pengembangan Ekonomi Syarikat Islam pada tahun 2018. Salah satu tugas dari tim tersebut adalah membantu wilayah-wilayah dan cabang-cabang yang belum dapat membentuk koperasi agar segera terbentuk. Selain itu, para pengurus SI di daerah juga diberikan pemahaman mengenai gerakan ekonomi SI itu seperti apa, agar terciptanya satu persepsi di antara SI Pusat dengan SI di daerah. Maka, dipilihlah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten sebagai upaya realisasi kegiatan ekonomi SI dalam program jangka pendek karena di wilayah-wilayah tersebut, khususnya di Jawa Barat cabang SI sudah terbentuk di seluruh kabupaten/kota.

3. Tata Kelola Pendidikan

Pendidikan adalah proses transformasi ilmu pengetahuan yang secara berkelanjutan untuk melahirkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dalam mengelola, menjaga dan melestarikan lingkungan. Dengan demikian, ilmu pengetahuan dapat digunakan untuk kemaslahatan umat manusia di atas muka bumi. Penataan pendidikan kemudian menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas dan daya juang Kaum Syarikat Islam dalam menghadapi zaman yang terus berkembang dengan segala dinamika percepatan perubahannya.

Program-program di bidang pendidikan ini kemudian disusun dalam program aksi dan ditetapkan dalam Rapat Pleno DPP SI di Jakarta. Program-program tersebut di antaranya; *Pertama*, misi Syarikat Islam dalam kurikulum sekolah Kaum Syarikat Islam. Sistem pendidikan SI hadir berdasarkan pokok-pokok pikiran Program Asas dan Program Tandhim. Penyelenggaraan pendidikan disini tidak hanya soal gedung, sarana belajar dan kelulusan siswa saja. Akan tetapi, SI juga memadukan model pendidikan yang mengintegrasikan partisipasi kaum seperti ruang diskusi kajian peradaban/kebudayaan, majelis taklim, ruang bermain anak, taman bacaan, dan sentra kreativitas anak dan remaja.²⁹

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Syarikat Islam, Jakarta, tanggal 27-28 Februari 2016, h. 10.

Kedua, majelis pendidikan profesional. *Ketiga*, penertiban aset lembaga pendidikan. Dalam upaya membangun kembali pendidikan maka penertiban dan kepemilikan aset-aset yang merupakan harta kekayaan SI wajib di tata kembali agar tetap menjadi aset milik SI. Akibat dari banyaknya wilayah-wilayah dan cabang-cabang yang mati maka banyak sekolah maupun aset-aset kekayaan SI lainnya menjadi terbengkalai. Termasuk gedung-gedung dan bangunan-bangunan milik SI di daerah. Selain itu, pendataan aset dan harta kekayaan SI juga untuk menghindarkan orang yang tidak bertanggungjawab menyalahgunakan aset-aset SI untuk kepentingan pribadinya.³⁰

Sejak 2 Mei 2016, Lajnah Tanfidziyah (LT) Syarikat Islam mulai melakukan kunjungan ke beberapa kabupaten/kota untuk konsolidasi ke sekolah-sekolah milik SI, mulai dari Luwuk Banggai, Balantak dan Banggai Kepulauan (Sulawesi Tengah), Banjarnegara (Jawa Tengah), Manado dan Bolaang Mongondow (Sulawesi Utara), Gorontalo, Samarinda (Kalimantan Timur), serta Alor dan Baranusa (Nusa Tenggara Timur).³¹ Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka melihat kelayakan sekolah-sekolah yang ada di kabupaten/kota tersebut, baik dari bangunan gedung, sarana prasarana dan tenaga pendidik serta manajemen sekolah. Berdasarkan hasil Musyawarah Kerja Nasional II (Mukernas II) Syarikat Islam, sejak 2 Mei 2016 Lajnah Tanfidziyah SI telah memulai konsolidasi dengan melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah milik SI yang terdapat di 16 kabupaten/kota hingga bulan Desember 2017.

4. Siyasa

Melalui Majelis Tahkim ke-40 SI kemudian bertransformasi kembali menjadi ormas yang bergerak di bidang dakwah dan ekonomi sebagai upaya untuk kembali pada cita-cita perjuangannya. Meskipun tidak bisa terlepas dari politik, namun gerakan SI tidak lagi dalam bentuk partai politik. Akan tetapi, dalam kaitannya dengan membangun sinergi kehidupan politik praktis tetap akan mendorong serta memberi kesempatan dan ruang kepada kader-kader SI untuk dapat berkiprah sesuai dengan nuraninya masing-masing namun dengan tetap membawa misi SI serta dapat berkontribusi terhadap kemajuan organisasi SI secara nyata.

³⁰ Musyawarah Kerja Nasional I Syarikat Islam, Gedung Diklat Mahkamah Konstitusi, Cisarua, tanggal 19-21 Mei 2017, h. 12.

³¹ Musyawarah Kerja Nasional II Syarikat Islam, Purwakarta, tanggal 15-16 Oktober 2018, h. 21-22.

Setelah tidak lagi bergerak dalam politik praktis, maka upaya dalam bidang *siyasah* diarahkan untuk menghidupkan kembali kursus-kursus kader di semua jenjang kepengurusan dan organisasi serumpun. Sehingga mampu mencetak kader-kader yang unggul, yaitu kader-kader pilihan yang siap melayani kepentingan rakyat demi mencapai kemandirian dan kesejahteraan umat. Kader-kader SI tersebut diharapkan tumbuh menjadi kader politik yang mengedepankan etika politik yang tinggi sehingga dapat membawa perubahan dan pengaruh di partai politiknya masing-masing, bahwa esensi dari politik merupakan pelayan publik. Karena, jika setiap kader yang terjun ke dunia politik tidak mempunyai etika politik yang tinggi maka mereka hanya akan mementingkan kepentingan kelompok maupun kepentingan pribadi mereka saja. Selain itu, tokoh politik juga harus mampu menjadi orang yang dapat memberikan solusi dan menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Sehingga partai politik, tokoh politik dan pemerintah bisa kembali mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Kader-kader SI akan diarahkan untuk berperan aktif melalui partai politik sesuai pilihannya masing-masing dan mendorong kader potensialnya untuk menduduki posisi penting di dalam partai politik, pemerintahan maupun lembaga negara lainnya agar dapat membawa perubahan bagi partai politik dan kehidupan politik saat ini. Kader-kader SI yang tergabung ke berbagai partai politik, di antaranya adalah Barna Soemantri, Andi Mappasukki, Achmad Farihal, Ratu Tinti Fathimah Chatib, Ali Abdul Muthalib, Sukardi Harun di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Suharso Monoarfa yang kebetulan saat ini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum DPP PPP menggantikan Romahurmuziy yang mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain di PPP, kader-kader SI juga berada di partai-partai lain, seperti Rahmat Gobel di Partai Nasdem, Shodiq Mujahid dan Hasan Zaenal Abidin di Partai Gerindra, Salman Al-Farisi di Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Fasiun di Partai Bulan Bintang (PBB), dan lain sebagainya. Kader-kader SI di daerah juga sebenarnya banyak yang tergabung di partai politik, bahkan di antaranya banyak yang menjadi anggota DPRD kabupaten/kota/provinsi.³² Kader-kader SI tersebut diharapkan dapat menjadi

³² Karena tidak ada pendataan kader yang detail secara menyeluruh di tiap-tiap cabang dan wilayah di seluruh Indonesia mengenai kader-kader Syarikat Islam yang menempati posisi di partai politik maupun di

negarawan dan tokoh politik yang mempunyai budi pekerti dan etika politik, sehingga bukan hanya sekedar menjadi politisi maupun petinggi politik saja. Dengan demikian, cita-cita SI sebagai organisasi kader umat Islam dan Indonesia dalam upaya mewujudkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan umat Islam dapat benar-benar terwujud.

Penutup

Setelah penyelenggaraan MT ke-40 dengan terpilihnya Hamdan Zoelva sebagai Ketua Umum Lajnah Tanfidziyah SI masa jihad 2015-2020, SI memutuskan untuk kembali ke khittah, yaitu mengembalikan gerakan SI yang sebelumnya merupakan organisasi politik menjadi organisasi yang bergerak di bidang dakwah dan ekonomi sebagai upaya untuk membangkitkan kembali SI. Kondisi partai-partai Islam saat ini, kekalahan partai-partai Islam dalam setiap pemilihan umum (Pemilu) serta konflik internal yang telah menyebabkan perpecahan dalam tubuh SI menjadi alasan utama untuk melakukan gerakan kembali ke khittah.

Terpecahnya kekuatan politik Islam dengan terbentuknya banyak partai membuat masyarakat semakin kebingungan dalam menentukan pilihan. Oleh karena itu, partai Islam kemudian tidak hanya bersaing dengan partai-partai nasionalis akan tetapi mereka juga bersaing dengan sesama partai Islam. Oleh karena itu, perolehan suara partai-partai Islam dalam setiap Pemilu khususnya dua Pemilu terakhir cenderung stagnan. Sistem kaderisasi yang kurang berjalan juga menjadi salah satu faktor kegagalan partai-partai Islam. Berdasarkan realitas tersebut kemudian semakin meyakinkan SI untuk tidak lagi terlibat dalam politik praktis, yaitu dengan menjadi partai politik. Berdasarkan kondisi sosial politik tersebut, maka SI memilih untuk menjadi organisasi kemasyarakatan yang fokus di bidang dakwah dan ekonomi.

Konflik internal dalam tubuh SI sudah terjadi sejak peristiwa pengambilalihan kekuasaan Partai Syarikat Islam Indonesia PSII pada tahun 1972. Konflik tersebut telah menyebabkan PSII (SI) mengalami perpecahan di seluruh wilayah Indonesia. Namun, pada MT ke-40 SI tahun 2015 telah berhasil menyatukan tiga faksi SI, yaitu SI pimpinan Rahardjo Tjakraningrat, SI pimpinan Djauhari Syamsuddin dan Kaum

pemerintahan oleh kepengurusan di tingkat pusat, menyebabkan penulis tidak dapat mencantumkan nama kader-kader SI tersebut.

Syarikat Islam pimpinan Maulana Nurhalim Chotib Al-Bantany di Sukabumi. Dalam upaya membangkitkan kembali SI, Hamdan Zoelva telah membuat strategi-strategi yang akan dilaksanakan oleh Syarikat Islam. Terdapat empat hal yang menjadi prioritas utama yang kemudian disebut Catur Program Syarikat Islam, yaitu 1) Konsolidasi Organisasi; 2) Pemberdayaan Ekonomi; 3) Tata Kelola Pendidikan; 4) dan *Siyasah*. Empat hal tersebut kemudian menjadi landasan dan arahan gerak perjuangan Syarikat Islam sejak tahun 2015.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelz. *HOS Tjokroaminoto: Hidup dan Perjuangannya Jilid I*. Jakarta: Bulan Bintang, 1952.
- Andriawan, Tony. Peran Tokoh Ormas Syarekat Islam Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017. *Skripsi*. Purwokerto: Jurusan Ilmu Politik Fisip Unsoed, 2018.
- Bayat, Asef. "Islamism and social movement theory" dalam *Third World Quarterly*, Vol. 26, No. 6 (2005), h. 891-908.
- Djaelani, Anton Timur. *Gerakan Sarekat Islam: Kontribusinya Pada Nasionalisme Indonesia*, terj. Gordon B. Manuain. Jakarta: LP3ES, 2017.
- Muryanti, Endang. "Muncul dan Pecahnya Sarekat Islam di Semarang 1913-1920" dalam *Paramita: Historical Studies Journal*, Vol. 20, No. 1 (2010), h. 21-35.
- Hanifah. Perjuangan Sarekat Islam Dalam Melawan Kolonialisme Belanda di Sumenep Madura 1913-1920. *Skripsi*. Yogyakarta: Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2003.
- Hawari, Muhammad. *Politik Partai: Meretes "Jalan Baru" Perjuangan Partai Politik Islam*. Bogor: CV IDeA Pustaka Utama, 2003.
- Johnston, Hank. *What is a social movement?*. Cambridge: Polity Press, 2014.
- Jurdi, Syarifuddin. "Gerakan Sosial Islam: Kemunculan, Eskalasi, Pembentukan Blok Politik dan Tipologi Artikulasi Gerakan" dalam *JPP (Jurnal Politik Profetik)*, Vol. 1, No. 1 (2013).
- McAdam, Doug & Sidney Tarrow, Charles Tilly. *The Dynamics of contention*. New York: Cambridge University Press, 2001.

- Munson, Ziad. "Islamic Mobilization: Social Movement Theory and the Egyptian Muslim Brotherhood" dalam *The Sociological Quarterly*, Vol. 42, No. 4 (2001), h. 487-510.
- Rahim, Arif. "Sarekat Islam: Gerakan Islam Modernis atau Tradisional?" dalam *Jurnal Ilmiah Dikdaya*, Vol. 10, No. 1 (2020), h. 119-25.
- Subekti, Valina Singka. *Partai Syarikat Islam Indonesia: Konstestasi Politik hingga Konflik Kekuasaan Elite*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Usman, Ismail. "Sarekat Islam (SI) Gerakan Pembaruan Politik Islam" dalam *Jurnal Potret. Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam*, Vol. 1, No. 21 (2017), h. 46-54.
- Winarni, Retno dan Mrr. Ratna Endang Widuati. "Konflik Politik Dalam Pergerakan Sarekat Islam 1926" dalam *Literasi: Indonesian Journal of Humanities*, Vol. 5, No. 2 (2015), h. 216-323.
- Wiktorowicz, Quintan. "Islamic Activism and Social Movement Theory: a New Direction for Research" dalam *Mediterranean Politics*, Vol. 7, No. 3 (2002), h. 187-211.

Dokumen

- Hasil Musyawarah Kerja Nasional I Syarikat Islam. Cisarua: Gedung Diklat Mahkamah Konstitusi. 19-21 Mei 2017.
- Hasil Musyawarah Kerja Nasional II Syarikat Islam. Purwakarta. 15-16 Oktober 2018.
- Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Syarikat Islam. Jakarta. 27-28 Februari 2016.

Wawancara

- Nunung Suhudiah, Ketua Tim Percepatan dan Pengembangan Ekonomi Syarikat Islam serta Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Syarikat Islam Kota Bekasi, wawancara, 6 Mei 2019.
- Syafruddin Djosan, Wakil Sekretaris Jenderal Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam, wawancara, 30 April 2019.

PEDOMAN PENULISAN JURNAL POLITIK PROFETIK

Sebelum penulis mengirim naskah ke redaksi Jurnal Politik Profetik (JPP), sebaiknya mengikuti ketentuan dan sistematika penulisan di bawah ini:

A. Pedoman Untuk Artikel

1. Topik yang dipublikasikan oleh Jurnal Politik Profetik berhubungan dengan Politik Islam, Demokrasi, Pemilu dan Partai Politik, Gerakan Sosial Islam dan Politik Lokal.
2. Masalah yang diangkat sebaiknya kasus 5 tahun terakhir (jika penelitian lapangan) yang memuat unsur kebaruan.
3. Naskah belum pernah dipublikasikan.
4. Sumber rujukan minimal 75% berasal dari jurnal ilmiah/buku terbitan lima tahun terakhir. Disarankan mengutip satu sampai tiga artikel dari terbitan Jurnal Politik Profetik.
5. Naskah yang dikirim ke JPP tidak dibenarkan dikirim ke penerbit lain untuk dipublikasikan sebelum ada keputusan dari pengelola JPP, dimuat atau tidaknya.
6. Panjang artikel sekitar 6000-8000 kata, namun naskah yang lebih panjang akan dipertimbangkan.
7. Naskah harus diserahkan untuk dipertimbangkan melalui website Jurnal Politik Profetik pada link <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/about/submissions#online>
Submissions
8. Naskah diketik dengan komputer menggunakan Microsoft Word, di atas kertas ukuran 21 cm x 29,7 cm (A4), spasi 1,5, huruf Times New Roman dan font size 12 pt..
9. Penulis harus bersedia untuk merevisi naskah berdasarkan masukan dari Editor dan Mitra Bestari.
10. Redaksi berhak menolak naskah yang tidak memenuhi kriteria/persyaratan teknis, mengadakan perubahan susunan naskah, memperbaiki bahasa dan berkonsultasi dengan penulis sebelum naskah dimuat.
11. Sistematika Penulisan:
 - a. **Judul Artikel**
Judul artikel harus padat, jelas dan tanpa singkatan. Jumlah maksimal 16 kata.
 - b. **Nama Penulis**
Cukup nama penulis tanpa menyertakan gelar
 - c. **Profesi/Institusi dan Email Penulis**
 - d. **Abstrak**

Abstrak berisikan tentang: tujuan dan manfaat mansukrip ini, metodologi penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan. Pastikan kesemuanya itu dibuat dengan sepadat dan sejelas-jelasnya. Abstrak menggunakan Bahasa Indonesia dengan jumlah kata kisaran 150-250 kata.

e. Kata Kunci

Kata kunci merefleksikan ide pokok dari naskah. Kata kunci memuat maksimal 5 kata kunci.

f. Abstract

g. Keywords

h. Pendahuluan

Pendahuluan harus menggambarkan dengan jelas latar belakang masalah dan memuat pertanyaan apa yang akan dijawab dalam pembahasan. Bagian ini penulis mesti memberi argumen tentang pentingnya penelitian dilakukan. Pengutipan setiap karya tulis orang lain harus menggunakan Catatan Kaki/*Footnote* (Lihat Gaya Selingkung JPP). Istilah-istilah asing dicetak miring (*italic*).

i. Tinjauan Pustaka/*Literature Review*

Pada bagian ini semaksimal mungkin berisi uraian sistematis tentang informasi hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Bagian ini memuat kelebihan dan kelemahan pada penelitian terdahulu yang dapat dijadikan argumen bahwa penelitian yang dikerjakan ini bersifat menyempurnakan atau mengembangkan penelitian terdahulu. Di sini perlu juga mempertegas kebaruan dari penelitian penulis.

j. Tinjauan Teori

Bagian ini juga memuat landasan teori berupa rangkuman teori-teori dari pustaka yang mendukung penelitian, serta memuat penjelasan tentang konsep dan prinsip dasar yang diperlukan untuk pemecahan permasalahan. Landasan teori berbentuk uraian kualitatif, model matematis, atau tools yang langsung berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bagian ini, penulis boleh tidak menuliskan Subbab “Tinjauan Teori”, namun langsung menuliskan subbab nama teori dan penjelasannya.

k. Metode Penelitian

Bagian ini memaparkan metode penelitian yang akan digunakan, di antaranya desain dan pendekatan penelitian, teknik pengambilan dan analisis data.

l. Hasil dan Pembahasan

Pada bagian ini, hasil penelitian dijelaskan secara komprehensif (singkat, padat dan jelas). Jika terdapat tabel dan gambar, atau figur-figur lainnya yang ada pada manuskrip, semuanya diletakkan simetris di tengah (seimbang antara kiri dan kanan). Bagian ini,

penulis boleh tidak menuliskan Subbab “Hasil dan Pembahasan”, namun langsung pada subbab inti persoalan yang sedang dibicarakan.

m. Kesimpulan

Kesimpulan menyesuaikan dengan apa yang diharapkan pada bagian pendahuluan di atas. Bagian ini dibuat dengan sesingkat dan sejelas mungkin.

n. Daftar Pustaka

Sumber rujukan minimal 75% berasal dari jurnal ilmiah/buku terbitan lima tahun terakhir. Disarankan mengutip satu sampai tiga artikel dari terbitan Jurnal Politik Profetik.

B. Pedoman Untuk Ulasan Buku

1. Harap sertakan di awal ulasan: Sampul Buku, Nama Penulis, Judul, Tempat, Penerbit, Tahun, Cetakan, Jumlah halaman, ISBN. Misalnya:



Syarifuddin Jurdi. *Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. Cetakan: I. Halaman: xxxviii+520. ISBN: 9786028479943.

2. Buku yang diulas merupakan buku terbitan 2 tahun terakhir.
3. Ulasan ditulis menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.
4. Naskah diketik dengan komputer menggunakan Microsoft Word, di atas kertas ukuran 21 cm x 29,7 cm (A4), spasi 1,5, huruf Times New Roman dan font size 12 pt..
5. Panjang rata-rata tulisan sekitar 2000-2500 kata.
6. Tinjauan harus dimulai dengan deskripsi singkat keseluruhan isi buku.
7. Hal-hal yang dapat dipertimbangkan dalam tubuh tinjauan meliputi:
 - Kekuatan dan kelemahan buku yang diulas.
 - Mengomentari gaya dan presentasi penulis.
 - Apakah tujuan penulis telah terpenuhi atau tidak.
 - Kesalahan (tipografi atau lainnya) dan kegunaan indeks.
 - Kepada siapa buku itu berguna dan direkomendasikan.
8. Penulisan referensi mengacu pada *Gaya Selingkung JPP*.
9. Sistematika Penulisan:

a. Judul

Judul ulasan harus padat, jelas dan tanpa singkatan. Jumlah maksimal 10 kata.

b. Identitas Buku

Identitas buku berisi Sampul Buku, Nama Penulis, Judul, Tempat, Penerbit, Tahun, Cetakan, Jumlah halaman, ISBN.

c. Nama Pengulas

Nama pengulas ditulis tanpa menggunakan gelar.

d. Afiliasi dan Email Pengulas

Institusi tempat pengulas bernaung serta alamat email yang dapat digunakan untuk berkorespondensi.

e. Isi Ulasan

Isi ulasan memuat tentang deskripsi singkat keseluruhan isi buku dan hal-hal yang dapat dipertimbangkan dalam tubuh tinjauan. Misalnya kekuatan dan kelemahan buku yang diulas, mengomentari gaya dan presentasi penulis, apakah tujuan penulis telah terpenuhi atau tidak, kesalahan (tipografi atau lainnya) dan kegunaan indeks serta kepada siapa buku itu berguna dan direkomendasikan.

f. Daftar Pustaka

Jika menggunakan sumber rujukan, maka pengutipan mengikuti *Gaya Selingkung JPP*.

GAYA SELINGKUNG JURNAL POLITIK PROFETIK

BUKU

Footnote:

¹David Jarry & Julia Jarry, *Collin Dictionary of Sociologi* (Glasgow :Harper Collins Publishers, 1991), h. 188.

Bibliography:

Jarry, David & Julia Jarry. *Collin Dictionary of Sociologi*. Glasgow :Harper Collins Publishers, 1991.

ARTIKEL DALAM BUKU

Footnote:

¹Tom B. Bottomore, “Kelas Elite dan Masyarakat” dalam Sartono Kartodirdjo (eds.), *Kepemimpinan dalam Dimensi Sosial* (Jakarta: LP3ES, 1990), h. 24.

Bibliography:

Bottomore, Tom B. “Kelas Elite dan Masyarakat” dalam Sartono Kartodirdjo (eds.). *Kepemimpinan dalam Dimensi Sosial*. Jakarta: LP3ES, 1990.

ARTIKEL DALAM JURNAL

Footnote:

¹Thandike Mkandawire, “Good Governance: The Itinerary of an Idea” dalam *Development in Practice*, Vol. 17, No. 5 (2007), h. 679.

Bibliography:

Mkandawire, Thandike. “Good Governance: The Itinerary of an Idea” dalam *Development in Practice*, Vol. 17, No. 5 (2007), h. 679-681.

ARTIKEL PADA MEDIA MASSA

Footnote:

¹Masdar F. Mas’udi, “Hubungan Agama dan Negara” dalam *Kompas*, 7 Agustus 2002.

Bibliography:

Mas’udi, Masdar F. “Hubungan Agama dan Negara” dalam *Kompas*, 7 Agustus 2002.

ARTIKEL DARI INTERNET

Footnote:

¹Noer Fauzi Rachman, “Master Plan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia” dalam <http://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2014/06/Rachman-2014-MP3EI-AMAN1.pdf> diakses 31 Mei 2018.

Bibliography:

Rachman, Noer Fauzi. “Master Plan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia” dalam <http://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2014/06/Rachman-2014-MP3EI-AMAN1.pdf> / diakses 31 Mei 2017.

ARTIKEL PROSIDING

Footnote:

¹Noorhaidi Hasan, “Memahami Radikalisme Islam” dalam *Paper Workshop Membangun Kesadaran dan Strategi dalam Menghadapi Gerakan Radikalisasi Agama*, Depok, 19 Desember (2011).

Bibliography:

Hasan, Noorhaidi. “Memahami Radikalisme Islam” dalam *Paper Workshop Membangun Kesadaran dan Strategi dalam Menghadapi Gerakan Radikalisasi Agama*, Depok, 19 Desember (2011).

SKRIPSI, TESIS, DISERTASI

Footnote:

¹Jumrah, “Politik Dinasti dan Monopoli Kekuasaan”. *Skripsi*. (Makassar: Fak. Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin, 2016), h. 10.

Bibliography:

Jumrah. “Politik Dinasti dan Monopoli Kekuasaan”. *Skripsi*. Makassar: Fak. Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin, 2016.

DOKUMEN RESMI

Footnote:

¹Mahkamah Konstitusi RI, “Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” dalam https://www.bphn.go.id/data/documents/7.7._perkara_nomor_14-puu-2013_23_jan_2014_pemilu_presiden_.pdf diakses 1 Juli 2019.

Bibliography:

Mahkamah Konstitusi RI. “Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” dalam https://www.bphn.go.id/data/documents/7.7._perkara_nomor_14-puu-2013_23_jan_2014_pemilu_presiden_.pdf diakses 1 Juli 2019.

WAWANCARA

Footnote:

¹Karaeng Tutu, Kepala Desa Bontoa, *wawancara*, 10 Juli 2019.

Bibliography:

Karaeng Tutu, Kepala Desa Bontoa, *wawancara*, 10 Juli 2019.

ATURAN PENULISAN FOOTNOTE (*Ibid.*, *Op.Cit.*, *Loc.Cit.*)

Ibid

Contoh

¹David Jarry & Julia Jarry, *Collin Dictionary of Sociologi* (Glasgow :Harper Collins Publishers, 1991), h. 188.

²*Ibid.*

³*Ibid.*, h. 193.

Penjelasan contoh

- Menggunakan Ibid karena merujuk kepada catatan kaki di atasnya tanpa diselingi catatan kaki lainnya.
- ²Ibid. berarti pengarang, judul, dan halaman sama persis dengan catatan kaki yang di atasnya.
- ³Ibid., h. 193. berarti pengarang dan judul sama persis dengan catatan kaki yang di atasnya, hanya berbeda halaman. Halaman sebelumnya 188 dan yang dikutip terakhir halaman 193.

Op.Cit.

Contoh

¹David Jarry & Julia Jarry, *Collin Dictionary of Sociologi* (Glasgow :Harper Collins Publishers, 1991), h. 188.

²Thandike Mkandawire, “Good Governance: The Itinerary of an Idea” dalam *Development in Practice*, Vol. 17, No 4/5 (2007), h. 679.

³David Jarry & Julia Jarry, *Op.Cit.*, h. 193.

Penjelasan contoh

- Menggunakan Op. Cit. karena sebelumnya telah diselingi oleh catatan kaki lain, yaitu: ²Thandike Mkandawire.
- Penggunaan ³David Jarry & Julia Jarry, *Op. Cit.*, h. 193. berarti pengarang (David Jarry & Julia Jarry) dan judulnya (*Collin Dictionary of Sociologi*) sama, hanya saja halamannya berbeda dengan catatan kaki yang pertama. Halaman sebelumnya 188 dan yang dikutip terakhir halaman 193.

Loc.Cit.

Contoh

¹David Jarry & Julia Jarry, *Collin Dictionary of Sociologi* (Glasgow :Harper Collins Publishers, 1991), h. 188.

²Thandike Mkandawire, “Good Governance: The Itinerary of an Idea” dalam *Development in Practice*, Vol. 17, No 4/5 (2007), h. 679.

³David Jarry & Julia Jarry, *Loc.Cit.*

Penjelasan contoh

- Menggunakan Loc. Cit. karena sebelumnya telah diselingi oleh catatan kaki lain, yaitu: ²Thandike Mkandawire.
- Penggunaan ³David Jarry & Julia Jarry, *Loc.Cit.* berarti pengarang, judul, dan halamannya (h. 188) sama.